



Algie Rizky Fadillah¹
 Achmad Kamalul Kafi²
 Michael Joseph Shernahto³
 Dian Fitriani Afifah⁴

STUDI IMPLEMENTASI SDGS NO POVERTY PADA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT: EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIAL DAERAH DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SDGs No Poverty melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan di Kabupaten Bandung Barat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data dokumentasi, hasil observasi, dan indikator kemiskinan daerah untuk menilai sejauh mana program-program tersebut mampu menjangkau kelompok sasaran, meningkatkan akses layanan dasar, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mengembangkan beragam program sosial yang selaras dengan agenda SDGs, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh konsistensi pemutakhiran data, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Program berbasis pemberdayaan dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan dibanding bantuan jangka pendek, namun keduanya tetap memegang peran penting dalam sistem perlindungan sosial daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, integrasi data terpadu, serta strategi pelaksanaan yang lebih adaptif dan inklusif untuk memastikan program sosial daerah mampu memberikan kontribusi maksimal dalam menurunkan kemiskinan dan mendukung pencapaian SDGs No Poverty di Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Sdgs, No Poverty, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan, Kemiskinan, Bandung Barat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the SDGs No Poverty through various social protection and empowerment programs in West Bandung Regency and evaluate their effectiveness in reducing poverty levels. The approach used is descriptive-analytical, utilizing documentary data, observational results, and regional poverty indicators to assess the extent to which these programs are able to reach target groups, increase access to basic services, and encourage community economic independence. The results of the study indicate that although the local government has developed various social programs aligned with the SDGs agenda, the effectiveness of their implementation is still influenced by the consistency of data updates, suboptimal cross-sectoral coordination, and varying levels of community participation. Empowerment-based programs are considered to have a more significant long-term impact than short-term assistance, but both still play an important role in the regional social protection system. Therefore, strengthening governance, integrated data integration, and more adaptive and inclusive implementation strategies are needed to ensure that regional social programs can make a maximum contribution to reducing poverty and supporting the achievement of the SDGs No Poverty in West Bandung Regency.

Keywords: Sdgs, No Poverty, Social Protection, Empowerment, Poverty, West Bandung.

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran
 email: algie24001@mail.unpad.ac.id, kafifadly@gmail.com, michjosh07@gmail.com,
 dian.fitriani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan nasional secara agregat cenderung positif, ketimpangan antardaerah tetap menjadi fenomena nyata dalam pembangunan sosial ekonomi. Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, serta ketepatan sasaran program sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan sebagian daerah tertinggal dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kesenjangan ini menjadi hambatan yang signifikan terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin pertama yaitu No Poverty.

Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah masing-masing. Prinsip desentralisasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengentasan kemiskinan karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan lokal secara lebih mendalam (Widodo, 2020). Namun demikian, efektivitas kebijakan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan, melainkan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data secara akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi tantangan serius terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, angka kemiskinan mencapai 10,49 persen, jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya 7,46 persen (BPS KBB, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa satu dari sepuluh penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih jauh, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,62 pada tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada pada kondisi ketidakmampuan ekonomi yang cukup jauh dari standar minimum kebutuhan hidup (Bappeda Jawa Barat, 2023).

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Peningkatan infrastruktur dan investasi wilayah tidak mampu secara otomatis mengurangi angka kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola sosial ekonomi daerah, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan (Rohim, 2022). Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi berbagai program sosial daerah dalam konteks pencapaian SDGs.

SDGs poin pertama, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan, menekankan pentingnya menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan jumlah penduduk miskin melalui intervensi yang bersifat inklusif dan berbasis bukti. Pemerintah daerah, sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan program pembangunan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan (UNDP, 2022). Di Kabupaten Bandung Barat, dua institusi yang berperan penting dalam implementasi kebijakan ini adalah Dinas Sosial sebagai pelaksana program sosial, dan Badan Pusat Statistik yang menyediakan data resmi terkait kemiskinan daerah.

Meskipun berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan program pemberdayaan ekonomi telah dijalankan, permasalahan koordinasi antarinstansi masih menjadi faktor penghambat efektivitas penanggulangan kemiskinan. Ketidaksinkronan data kemiskinan antara Dinas Sosial dan BPS menyebabkan tumpang tindih penerima bantuan serta menurunkan efisiensi program perlindungan sosial (Fahmi, 2023). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program menyebabkan kebijakan sering kali bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik warga miskin.

Kesenjangan antara idealisme SDGs dan implementasi di tingkat lokal menciptakan policy gap yang perlu segera diatasi. Untuk itu, analisis mengenai efektivitas program sosial daerah, mekanisme koordinasi, dan peran aktor kunci menjadi penting dalam rangka memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan pencapaian SDGs di Kabupaten Bandung Barat.

Evaluasi berbasis data dan perspektif otonomi daerah diperlukan guna melihat apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Dwipayana, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi SDGs No Poverty pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan daerah, menilai efektivitas pelaksanaan program sosial, serta mengidentifikasi hambatan kelembagaan, struktural, dan sosial yang mempengaruhi pencapaian target pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ini bertujuan untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan ini adalah untuk membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan dengan tujuan dan indikator yang dapat diukur. Sampai tahun 2030, kemajuan pembangunan harus dapat dipantau dan dinilai. SDGs menekankan prinsip universal, yang berarti bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing; prinsip integrasi, yang menekankan bahwa masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan saling mempengaruhi dan berkorelasi satu sama lain; dan prinsip no one left behind, yang menekankan bahwa tidak ada kelompok yang boleh tertinggal dalam proses pembangunan.

Karena kerangka ini didasarkan pada hak asasi manusia dan pemerataan kesempatan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup setiap orang tanpa diskriminasi sambil menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan global, mencakup berbagai hal penting. Ini mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas tinggi, pekerjaan yang layak untuk semua, kesetaraan gender, akses yang terjangkau ke air dan sanitasi, energi bersih yang berkelanjutan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, perlindungan kehidupan di darat dan laut, pembangunan damai, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi internasional. Setiap tujuan memiliki tujuan dan indikator yang berbeda.

Indikator ini memungkinkan untuk melacak kemajuan secara komparatif baik antar negara maupun antar daerah. Ini memungkinkan penyesuaian dan evaluasi rutin program kebijakan. SDGs di tingkat nasional dan daerah mendorong harmonisasi kebijakan lintas sektor dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi sipil, dan komunitas lokal agar upaya pembangunan lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Analisis etika pembangunan, epistemologi pembelajaran, dan pelaporan data, serta kajian keadilan ekologis, semuanya merupakan topik penelitian tentang SDGs.

2. SDG's Point 1: No Poverty

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utamanya; ini juga dikenal sebagai SDGs, atau No Poverty. Secara keseluruhan, tujuan ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui kombinasi kebijakan sosial, program perlindungan pendapatan, akses ke layanan dasar, dan upaya pemberdayaan ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu masalah strategis yang harus ditangani dengan serius dalam konteks Bandung Barat. Menurut data BPS tahun 2024, persentase penduduk miskin di daerah ini mencapai sekitar 9,7%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Bandung Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian informal dan tradisional, dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata dan industri kecil-menengah, yang merupakan bagian penting dari ekonomi daerah. Penghapusan kemiskinan mencakup meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui lapangan kerja yang layak, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, dan penyediaan jaring

pengaman sosial seperti bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan yang membantu kelompok rentan mendapatkan akses ke layanan dasar. SDGs 1 juga menekankan bahwa data yang akurat diperlukan untuk mengamati tingkat kemiskinan, mengidentifikasi kelompok rentan, dan mengevaluasi seberapa efektif program yang dilaksanakan di daerah. Selain itu, tujuan ini menunjukkan bahwa lembaga harus transparan dan responsif terhadap perubahan ekonomi seperti krisis kesehatan, bencana, atau gangguan pasar kerja agar kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat untuk menghentikan peningkatan kemiskinan.

Upaya daerah sejalan dengan prinsip universal SDGs, dengan penekanan pada inklusi sosial, akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan peluang ekonomi tanpa meningkatkan biaya hidup keluarga miskin. Secara praktis, pengembangan program di Bandung Barat harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, komunitas lokal, dan lembaga swadaya untuk membuat rencana tindakan yang dapat diukur dan memiliki indikator kemajuan yang jelas, seperti partisipasi angkatan kerja, jumlah rumah tangga di bawah garis kemiskinan, dan akses ke layanan perlindungan sosial. Tujuan akhirnya adalah menurunkan ketimpangan serta meningkatkan kualitas hidup.

3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Ini tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga termasuk kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, aset produktif, dan ketidakmampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Berbagai teori dibahas dalam penelitian ilmu sosial dan ekonomi untuk menjelaskan berbagai jenis kemiskinan. Untuk memahami bagaimana kemiskinan muncul, bagaimana ia terus meningkat, dan intervensi apa yang paling efektif untuk mengatasinya, teori-teori ini sangat penting. Tiga teori utama tentang kemiskinan adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural. Teori-teori ini kemudian diikuti oleh teori lain seperti kemiskinan siklus, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural, yang merupakan konsekuensi dari faktor lingkungan.

Kemiskinan absolut adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Rowntree (1901) adalah peneliti ekonomi klasik dan statistik sosial yang pertama kali menggunakan istilah "kemiskinan absolut", yang mengukur kemiskinan berdasarkan biaya minimum kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia sering menggunakan standar kemiskinan absolut dalam dunia modern. Bank Dunia menetapkan ambang kemiskinan ekstrem global sebesar US\$2,15 per hari (Purchasing Power Parity/PPP), sedangkan Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum makanan per kapita sebesar 2.100 kilokalori per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Individu atau rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah garis ini dianggap miskin absolut.

Ukuran ini sangat membantu pemerintah menetapkan tujuan penurunan kemiskinan karena sifatnya objektif. Berbeda dengan itu, kemiskinan relatif adalah ketika seseorang berada dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih rendah daripada standar hidup rata-rata masyarakat di sekitarnya, meskipun tidak miskin secara absolut. Peter Townsend (1979) menciptakan gagasan ini, menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sosial yang dianggap normal oleh masyarakat, orang tersebut dianggap miskin. Oleh karena itu, kemiskinan relatif sangat terkait dengan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan. Meskipun seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tetap dianggap miskin relatif jika mereka memiliki akses ke pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, perumahan yang aman, atau akses ke transportasi yang mudah. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan materi tetapi juga ketidakadilan sosial dan ketimpangan yang membatasi seseorang untuk maju.

Namun, kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan yang tidak adil. Artinya, kemiskinan tidak disebabkan oleh kesalahan individu; sebaliknya, sistem yang menghalangi kelompok tertentu untuk makmur. Para ekonom pembangunan seperti Gunnar Myrdal (1957), Amartya Sen (1999), dan pendekatan strukturalis dalam ekonomi politik adalah sumber teori ini. Ketimpangan dalam pembangunan desa dan kota, birokrasi yang tidak mendukung usaha kecil, kepemilikan tanah

yang tidak merata, kurangnya pendidikan berkualitas, diskriminasi, dan keterbatasan infrastruktur adalah beberapa penyebab kemiskinan struktural. Karena hambatan struktural yang tidak berubah, kemiskinan ini menyebar dari generasi ke generasi. Untuk mengatasi kemiskinan struktural, kebijakan jangka panjang, reformasi ekonomi, dan intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Oscar Lewis (1966) mempopulerkan teori kemiskinan kultural, selain ketiga teori utama tersebut. Teori ini menyatakan bahwa pola pikir, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang diwariskan dari budaya yang mengalami kemiskinan dapat menyebabkan kemiskinan muncul dan bertahan. Misalnya, menjadi pasrah, tidak memiliki keinginan untuk berubah, atau bergantung pada bantuan orang lain. Teori ini sering dikritik karena sering menyalahkan korban dan mengabaikan faktor-faktor struktural.

Sebaliknya, teori kemiskinan siklus, atau kemiskinan siklus, mengatakan bahwa rumah tangga miskin lebih sulit keluar dari kemiskinan karena siklus berulang, seperti krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, bencana alam, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan natural adalah teori lain yang relevan yang menekankan bagaimana faktor-faktor lingkungan fisik, seperti lokasi geografis, minimnya sumber daya alam, rawan bencana, atau keterpencilan wilayah, memengaruhi tingkat kemiskinan.

4. Indikator Kemiskinan menurut BPS

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kemiskinan didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar, yaitu pendekatan kebutuhan dasar yang menilai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Pendekatan ini menggunakan tiga indikator utama, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dalam statistika sosial, ketiga indikator tersebut merupakan bagian dari metode FGT (Foster-Greer-Thorbecke), yang secara luas digunakan untuk mengukur intensitas, kedalaman, dan distribusi kemiskinan dalam suatu wilayah.

Menurut data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2024, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat yang miskin adalah 9,87%. Ini menunjukkan bahwa hampir satu dari sepuluh orang masih hidup di bawah Garis Kemiskinan. Menurut Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Bandung Barat tahun 2024, nilai P1 sebesar 0,70 menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah ini rata-rata masih memiliki kesenjangan pengeluaran yang cukup besar dibanding ambang standar minimum. Sementara itu, nilai P2 sebesar 0,23 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin tidak terlalu ekstrem, meskipun masih ada beberapa kelompok yang kondisinya lebih buruk daripada rata-rata.

Secara keseluruhan, ketiga indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan kemiskinan yang bukan hanya terkait dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga terkait dengan kualitas hidup. Data BPS juga menunjukkan tren positif dari sisi jumlah, dengan jumlah penduduk miskin turun dari 183,70 ribu pada 2022 menjadi 179,40 ribu pada 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi SDGs poin 1 (No Poverty) dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses, dinamika, serta efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara mendalam melalui pengalaman dan perspektif para pelaksana kebijakan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan data, pelaksanaan bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain wawancara, teknik observasi lapangan dan studi dokumentasi juga digunakan untuk memverifikasi praktik implementasi program serta menelusuri kesesuaian antara kebijakan tertulis dan pelaksanaannya.

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi relevan terkait efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik untuk menggambarkan pola koordinasi antarinstansi, akurasi data kemiskinan, dan dinamika

implementasi program. Kesimpulan kemudian ditarik melalui proses interpretasi mendalam dan verifikasi antar-sumber untuk memastikan validitas temuan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana program sosial daerah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta mendukung pencapaian SDGs No Poverty di Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Indikator Risiko Kemiskinan atau Terpinggirkan Berdasarkan IPM di Kabupaten Bandung Barat 2010-2024

Menurut Soman Wisnu Dharma dalam buku Pengukuran Kemiskinan dan Informasi Di Baliknya salah satu penilaian risiko kemiskinan adalah usia harapan hidup. Maka berdasarkan indikator tersebut penduduk berisiko miskin atau terpinggiran berada pada tingkat terendah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 dari 15 tahun terakhir yang kami teliti. Nilai tertinggi muncul pada 2024. Terjadi kenaikan di semua kategori pada setiap tahunnya di Kabupaten Bandung Barat. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023.

Analisis indikator penduduk miskin menunjukkan pola yang sama. Kategori usia harapan hidup mengalami peningkatan indikator pada 2024 dibandingkan 2010. Peningkatan terbesar sebesar 0,31 poin terjadi di tahun 2023. Situasi yang membaik dan variasi yang meningkat terlihat setiap tahun.

Pada indikator harapan lama sekolah, terdapat pula peningkatan yang signifikan. Nilainya naik dari 10,53 pada 2012 menjadi 11 pada 2013. Kondisi terburuk pada 2010 dengan 9,68 poin. Setiap tahun mencatat kenaikan indikator. Namun, perbedaan setiap tahunnya perlu diperhatikan. Pada empat tahun pertama, perbedaan tergolong besar. Pada tahun-tahun berikutnya perbedaan bervariasi mulai dari 0,01 sampai 0,33 poin.

Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan nilai terbaik atau tertinggi pada 2024 dengan 8,24 tahun. Kondisi terburuk muncul pada tahun 2010 dengan 7,03 poin. Terjadi peningkatan setiap tahunnya. Nilainya meningkat dari kurang dari 8 tahun menjadi lebih dari 8 tahun pada 2024. Tercatat peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan 0,3 tahun.

Pengeluaran per kapita (ribu/orang/tahun) juga menjadi indikator penilaian risiko kemiskinan. Kondisi terburuk muncul pada 2010 dengan pengeluaran per kapita setiap orangnya Rp6.702. Tercatat kondisi terbaik pada 2024 dengan pengeluaran per kapita Rp9.583.



Empat indikator yang dianalisis menunjukkan perubahan penting dalam dinamika pembangunan manusia dan risiko kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat selama lima belas tahun terakhir. Seluruh indikator meningkat dan menggambarkan perbaikan kapasitas dasar penduduk. Namun peningkatan ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sehingga analisis memerlukan bingkai teori ilmu pemerintahan untuk memahami bagaimana kebijakan publik memengaruhi arah perubahan tersebut.

Peningkatan usia harapan hidup menunjukkan adanya perbaikan layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan. Perubahan ini berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah menjalankan peran sebagai penyedia dan penjamin layanan dasar. Kenaikan terbesar pada 2023 memberi sinyal bahwa kebijakan kesehatan atau program perlindungan sosial pada periode tersebut berjalan lebih efektif. Meskipun demikian, meningkatnya indikator ini tidak serta-merta

menandakan pemerataan kinerja pelayanan. Kelompok rentan tetap menghadapi hambatan yang tidak tampak dalam angka agregat.

Indikator harapan lama sekolah turut menunjukkan peningkatan signifikan. Kenaikan dari 9,68 tahun pada 2010 menjadi lebih dari 11 tahun pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan penguatan fungsi pemerintah dalam pelayanan pendidikan. Pemerintah wajib mengelola keseimbangan antara akses, mutu, dan keberlanjutan layanan. Peningkatan tajam pada 2012–2013 dapat mencerminkan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif atau pendanaan yang lebih tepat sasaran. Variasi antartahun menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum stabil di awal periode.

Rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 7,03 menjadi 8,24 tahun mencerminkan hasil dari fungsi pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kapasitas warga agar mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Nilai yang masih berada di kisaran pendidikan menengah pertama mengindikasikan bahwa pemberdayaan belum optimal. Kondisi ini membuat sebagian penduduk tetap berada dalam kerentanan ekonomi.

Pengeluaran per kapita yang meningkat dari Rp6.702 menjadi Rp9.583 menunjukkan perbaikan daya beli, tetapi tetap harus dibaca dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah memegang peran dalam mengatur alokasi anggaran, termasuk program bantuan sosial, subsidi, serta pembiayaan layanan dasar. Peningkatan daya beli tidak hanya mencerminkan pendapatan yang naik, tetapi juga efektivitas intervensi pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin. Namun jika peningkatan pengeluaran tidak melampaui tekanan inflasi, rumah tangga tetap berada dalam posisi rentan.

Secara keseluruhan, peningkatan seluruh indikator menggambarkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia. Namun keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari perubahan angka, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan secara seimbang. Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan kemajuan, tetapi ketimpangan peningkatan indikator memperlihatkan bahwa kelompok tertentu belum memperoleh manfaat yang setara. Hal ini menegaskan pentingnya penyempurnaan tata kelola kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan peningkatan layanan dasar, agar pengurangan risiko kemiskinan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi SDGs No Poverty di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh persoalan struktural dan tata kelola yang belum optimal. Tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan rata-rata provinsi, ditambah dengan kedalamannya dan keparahannya yang masih mencolok, mencerminkan adanya jurang kesejahteraan yang belum mampu dijembatani oleh kebijakan sosial daerah. Ketidaksinkronan data kemiskinan antarinstansi, terutama antara Dinas Sosial dan BPS, memperlihatkan bahwa fondasi informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program belum solid, sehingga berisiko menimbulkan ketidakstabilitan dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini mempertegas perlunya penguatan koordinasi, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Berbagai indikator pembangunan manusia yang terus meningkat mengindikasikan adanya kemajuan dalam aspek pelayanan publik dan pembangunan sosial ekonomi, namun pencapaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketidakseimbangan manfaat antar kelompok masyarakat menandakan bahwa strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan. Hambatan pada akurasi data, koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program memperlihatkan perlunya transformasi pendekatan yang lebih berbasis data, inklusif, dan kolaboratif. Dengan memperkuat prinsip otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektivitas program sosial daerah diharapkan dapat meningkat sehingga upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan target SDGs No Poverty.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia 2024. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2024. BPS KBB.
- Bank Dunia. (2022). Poverty overview & global poverty line. World Bank.
- Chambers, R. (1983). Rural poverty: Unperceived problems and invisible people. *World Development*, 11(3), 245–265.
- Lewis, O. (1966). The culture of poverty. *Scientific American*, 215(4), 19–25.
- Myrdal, G. (1957). Economic theory and underdeveloped regions. Duckworth.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2024). Laporan penanggulangan kemiskinan daerah (TPKD). Pemda KBB.
- Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A study of town life. Macmillan.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. Penguin Books.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). SDGs Indonesia report.